



## MENGGAGAS PEMBENTUKAN DEWAN AUDIT FORENSIK DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (IT) : SEBUAH IKHTIAR PENDETEKSIAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR PUBLIK

ISNAN MURDIANSYAH, YONA OCTIANI LESTARI, NANIK WAHYUNI

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
isnanmurdiansyah86@gmail.com

### ABSTRACT

*This paper aims to analyze the role of information technology-based regional forensic audit boards to create reliable regional finances in order to realize good corporate governance within the local government. Improving performance and accountability is an absolute must for local governments in the autonomous era, both in terms of bureaucracy, information systems and institutions, however, the corruption rate remains high, marked by the arrest of hundreds of regional heads and governors by the Corruption Eradication Commission. One of the main causes of the proliferation of corruption is the lack of management of regional finances in accordance with the principles of good governance, resulting in regional finances being less reliable and not yet integrated. The results of the analysis of this paper show that the information technology (IT)-based regional forensic audit board plays an important role in creating reliable regional finance in order to realize good corporate governance in the local government environment.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance, the local Forensic of Audit board, the Local Government, The Local Financial, Informatics of Technology.*

### PENDAHULUAN

Capaian menggembirakan didapatkan perekonomian nasional sepanjang tahun 2016 ditengah ketidakpastian krisis keuangan global, setelah mendapatkan kado manis “*investment grade*” berupa kenaikan rating peringkat utang ke level investment grade (layak investasi) dari berbagai lembaga pemeringkat utang dunia (*Japan Credit Rating Agency, Fitch Rating dan Moody’s Investor Service*). Kembali, laporan BPS terbaru secara lengkap menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional hingga September 2016 mencapai 5,1 persen. Dengan rincian, produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 7.427,1 triliun. Pendapatan per kapita juga meningkat mencapai 17 persen dibandingkan tahun lalu. Pada 2012 pendapatan per kapita mencapai 30,8 juta (USD 3.542,9) sedangkan pada 2011 hanya 27,1 juta (USD 3.010,1).

Namun sayangnya dibalik pencapaian menggembirakan tersebut, ada beberapa noda ekonomi. **Pertama**, Persoalan klasik berupa penyakit ketimpangan/kesenjangan ekonomi masih saja menodai wajah negeri ini. Kontributor utama pertumbuhan ekonomi masih didominasi sektor *non-tradeable* (pengangkutan, komunikasi, hotel, restoran dan lain-lain) sementara sektor riil (*tradeable*) khususnya



pertanian semakin terpuruk. Dominasi Pulau Jawa sebagai penyumbang utama laju pertumbuhan nasional tetap tak tergoyahkan, di sisi lain daerah luar Jawa pertumbuhannya masih stagnan.

**Kedua**, dominannya sektor konsumsi, khususnya rumah tangga dalam struktur ekonomi nasional. Data terbaru BPS menunjukkan sektor konsumsi rumah tangga kontribusinya mencapai 54,6 persen mengalahkan sektor investasi, ekspor dan impor. Tentunya hal ini sesuatu yang tidak sehat bila perekonomian sebuah negara ditopang oleh sektor konsumsi karena rawan sekali terjadi guncangan yang bisa mengoyahkan perekonomian dalam negeri.

**Ketiga**, masih tingginya perilaku korupsi di negeri ini yang beregenerasi secara masif yang berpotensi menghambat kegiatan bisnis di Indonesia. Indikasinya dapat dilihat, selama 2004-2011, sebanyak 1.408 kasus korupsi merugikan keuangan negara sebesar Rp 39,3 triliun. Indonesia Corruption Watch (ICW) mempublikasikan statistik menghebohkan bahwa terdapat 285 kasus korupsi yang terjadi di tingkat pusat dan daerah. Sekitar 597 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum. Dari jumlah tersebut, sektor pemerintah daerah memiliki jumlah kasus terbanyak mencapai 177 kasus.

Hal ini dikuatkan pula data statistik yang dikeluarkan oleh KPK dan Mendagri. Pada periode 2004-2011, tercatat setidaknya ada 29 kepala daerah dan delapan gubernur yang terkait tindak pidana korupsi. Pada Mei 2012, Mendagri mempublikasikan bahwa terdapat 173 kepala daerah tersangkut kasus hukum. Terjeratnya 173 orang dari 524 kepala daerah dalam korupsi terkait penggelembungan dana APBD dan munculnya 49 kasus tindak pidana korupsi tingkat pemerintah kota/kabupatenserta 29 wali kota/wakil bupati yang diproses secara hukum di KPK sepanjang 2004-2011 (Data Kemendagri, Mei 2012) menunjukkan betapa kuatnya hasrat korupsi elite-elite lokal yang mengabaikan pemertingan kesejahteraan rakyat dengan berbagai modus transaksi bisnis dan kepentingan dengan berbagai entitas kelompok pengusaha yang beraroma korupsi. Bahkan dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (4/12), Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan 1.408 kasus korupsi telah merampok uang rakyat Rp 39,3 triliun dalam kurun waktu 2004-2011. Tak salah bila banyak pihak menyebut korupsi di negeri ini sudah sampai pada taraf apa yang disebut oleh Robert Klitgaard (2001) sebagai "budaya korupsi". Bukan semua orang Indonesia melakukan korupsi, tetapi kita melihat keengganan masyarakat melaporkan oknum pejabat negara, birokrat, politisi, dan oknum aparat hukum yang melakukan praktik korupsi. Artinya, di dalam masyarakat kita terjadi sikap yang permisif (tidak mau peduli terhadap urusan lain), termasuk dalam masalah korupsi.

Analoginya korupsi di Indonesia saat ini mirip orang yang tengah menderita penyakit tumor ganas. Sel-selnya menyebar ke seluruh tubuh, akibatnya orang tersebut lumpuh tidak berkutik. Tak salah, menurut survei terbaru yang dirilis oleh *World Justice Project* melaporkan bahwa Indonesia menempati posisi ke-47 dari 66 negara di dunia yang disurvei dalam hal ketiadaan korupsi dan akses untuk keadilan sipil. Hasil survei terhadap penegakan hukum di 66 negara dunia tersebut juga melaporkan praktik korupsi di Indonesia sudah semakin menyebar luas. Bahkan, untuk level kawasan Asia Timur dan Pasifik, ranking ketiadaan korupsi di Indonesia masuk di urutan kedua dari paling buncit sebelum Kamboja. Untuk urusan bebas korupsi itu, Indonesia bahkan kalah jika dibandingkan dengan Vietnam, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Yang paling dikhawatirkan korupsi akan mempersulit pembangunan ekonomi dengan menimbulkan distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi



dalam dunia usaha. Selain itu, korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih menginvestasikannya ke negara-negara yang lebih aman, seperti China dan India. Akibatnya akan mengurangi pencapaian *actual growth* dari nilai *potential growth* yang ada di daerah.

Dalam era reformasi dan otonomi daerah saat ini semakin menguatnya tuntutan publik akan transparansi informasi, khususnya keuangan daerah. Tidak dapat dihindarkan lagi oleh pemerintah daerah karena hal tersebut sangat dibutuhkan oleh calon investor penanam modal, pemerintah dalam menyediakan *public service* yang efektif dan *accountable* serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat dan publik sebagai *stake holdersnya*. Oleh karena itu, pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan secara akurat, relevan, tepat waktu, handal dan dapat dipercaya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pemerintah daerah yang handal. Namun sayangnya sampai saat ini hampir semua Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang dimiliki oleh pemerintah daerah di Indonesia rata-rata masih lemah dan kurang handal yang menyebabkan lemahnya pengendalian intern yang berimbas pada maraknya tindakan korupsi di lingkungan pemerintah daerah yang menyeret beberapa gubernur dan bupati ke penjara. Serta enggannya calon investor melakukan investasi di daerah yang menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa di Indonesia. Dan semakin menurunnya kepercayaan publik dan masyarakat terhadap pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu, saat ini masih banyak ditemukan laporan keuangan Pemda yang tidak bisa diaudit oleh BPK, bila pun bisa diaudit opininya disclaimer. Kondisi ini menyiratkan ada sistem yang hilang di pemerintahan daerah. Secara konvensional memang berjalan tapi memperoleh data secara akurat dan cepat terbukti masih menjadi kendala. Hal ini menunjukkan betapa peranan informasi begitu penting dan sangat dibutuhkan saat ini. Untuk itu, diperlukan usaha yang cerdas dan terus-menerus dalam mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dengan menciptakan sistem keuangan daerah yang handal. Betapapun, kekuatan IT tidak bisa diremehkan karena beberapa negara yang telah mengaplikasikan kemajuan teknologi ini, ternyata mampu menjadi negara yang kuat dalam bidang apapun. Melalui IT dan telekomunikasi mampu melakukan *crossing* data dan mengintegrasikan sedemikian banyak sebaran informasi. IT bisa menghafal jutaan memori dan miliaran data dari berbagai sumber sehingga bisa membantu pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini IT adalah alat untuk membuat langkah strategis dengan cepat dan tepat. IT bisa secara cepat melakukan *matching* 1.366 PERDA dengan undang-undang yang berhubungan serta mencatat transaksi dari berbagai sumber, kemudian langsung memberikan input kepada pemerintah daerah apabila secara substansial sama. Teknologi IT yang semakin berkembang ini nampaknya kurang dimanfaatkan padahal melalui instruksi Presiden No. 06 tanggal 24 April 2001 tentang telematika (telekomunikasi, media, dan informatika) yang bertujuan menciptakan *E-Government di Indonesia*. Disampaikan melalui perintah itu bahwa aparat pemerintah harus memanfaatkan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* serta mempercepat proses demokrasi. E-Government wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi telematika ini diharapkan menghasilkan simplikasi hubungan antara masyarakat dan pemerintah, yaitu dalam bentuk G2C (*Government to Citizen*), G2B (*Government to Business*) dan



G2G (*Government to Government*).

Mengingat betapa besar dan pentingnya manfaat dari pembentukan model dewan audit forensik daerah berbasis teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah. Oleh sebab itu rumusan masalah paper ini bagaimanakah mekanisme kerja, manfaat dan pengaruh dari model pembentukan dewan audit Forensik daerah yang berbasis teknologi informasi (IT) di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) dalam mendeteksi dan mencegah korupsi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan studi literatur atau kajian empiris dalam menganalisa sebuah permasalahan dan memberikan solusinya dalam bentuk model pengembangan sistem. Obyek pengamatan dan penelitian sistem informasi keuangan sektor publik/pemerintahan, khususnya keuangan daerah.

## **HASIL**

### **1. Menggagas Pembentukan Dewan Audit Forensik Daerah Berbasis Teknologi Informasi (IT)**

Krisis kepercayaan yang dialami bangsa Indonesia kini yang ditandai merebaknya korupsi di lingkungan Pemda, merupakan salah satu penyebab keterpurukan bangsa Indonesia di mata internasional. Tak salah dalam laporan Fund for Peace (2012), Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 182 negara terkorup di dunia. Ini menandakan proyek eliminasi korupsi dan kerugian rakyat akibat kebijakan korup masih tertatih-tatih. Penyebab utama masalah ini karena terjadinya gap atau jarak yang lebar antara pemerintah daerah dengan para stakeholders karena ketertutupan pemerintah dan kurang transparannya pemerintah daerah dalam memberikan informasi finansialnya yang mengakibatkan kurang percayanya stakeholders. Oleh sebab itu, pendirian sebuah Informasi Technology Audit Council (ITAC) melalui dewan audit forensik daerah berbasis teknologi informasi di tiap Pemda merupakan sebuah pemikiran brilian yang dapat menjadi solusi alternatif dalam menghilangkan gap antara Pemda dengan para mitranya.

ITAC adalah kumpulan dari perwakilan stakeholder yang memiliki jadwal berkala dan bertemu melakukan diskusi bersama, persis sama dengan fungsi MPR di Indonesia. MPR merupakan sebuah forum yang terdiri dari CIO (Bupati dan Walikota), Divisi IT (DPR) dan perwakilan users daerah. Dalam forum berkala ini tugas utamanya adalah menilai dan mengaudit kinerja sistem informasi yang tersedia, disamping melakukan perancangannya di masa mendatang. Forum ini juga memiliki hak meminta pertanggungjawaban CIO sehubungan dengan tugasnya membangun sistem yang mereka butuhkan walaupun tidak memiliki hubungan struktural secara formal, namun secara psikologis pertemuan ini berpengaruh efektif kepada CIO dan timnya (DPR).

Sebagai salah satu senjata utama dalam bersiang menghadapi era global dan perdagangan bebas saat ini, pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan kinerja teknologi informasi yang dipakainya sekarang ini. Untuk keperluan tersebut, pemerintah daerah harus membentuk sebuah divisi yang bertanggung jawab atas hal-hal yang berhubungan dengan teknologi informasi, yang disebut dengan Departemen Teknologi Informasi. Dalam hal ini seorang *Chief Information Officer* (CIO) yaitu Bupati dan Walikota bertanggung jawab kepada pemimpin daerahnya (Gubernur).



## 1. Evaluasi Aspek Pembangunan Teknologi Informasi (IT) dalam Sistem Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam mewujudkan harapan terciptanya *good governance* pada era globalisasi perekonomian dunia dan otonomi daerah saat ini, maka hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memiliki suatu sistem keuangan daerah yang handal. Diantara komponen input yang paling penting dan dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam sistem keuangannya adalah Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Alasannya SIA merupakan *basic* dari komponen input yang terdapat pada seluruh sistem informasi fungsional. Bahkan secara lebih mendasar, SIA merupakan dasar yang di atasnya dibangun sub sistem informasi keuangan daerah yang berorientasi pada layanan publik. Melalui SIA ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak eksternal maupun internal. Namun sayangnya SIA di pemerintah daerah sekarang ini masih mempunyai banyak masalah dan kelemahan yang menyebabkan lemahnya pengendalian intern. Imbasnya kasus korupsi berupa penyelewengan dana APBD oleh Pemda menjamur di daerah-daerah. Selain faktor SDM, lemahnya penegakan hukum dan birokrasi, penyebab utama terjadinya korupsi adalah lemahnya pembangunan infrastruktur teknologi informasi (IT) dalam sistem keuangan daerah.

Beberapa kelemahan dan masalah yang muncul dalam sistem informasi akuntansi (SIA) pemerintah daerah yang bersifat fundamental dan berpengaruh terhadap keuangan daerah saat ini, ditinjau dari aspek pembangunan infrastruktur teknologi informasi (IT).

### a. Aplikasi teknologi informasi (IT) tidak terintegrasi satu sama lain

Kasus korupsi yang terjadi di daerah-daerah, bahkan sampai menyeret beberapa mantan bupati dan gubernur ke penjara, menandakan bukti lemahnya sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah. Penyebab utamanya pemerintah daerah masih belum mampu mengintegrasikan sistem keuangan yang dimilikinya, khususnya penerimaan daerah yang selama ini berjalan dan dimiliki dalam satu sistem, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan-penerimaan yang sah dari sumber lain. Hal ini menyebabkan kurangnya keakuratan dan kevaliditasan data sehingga menyebabkan informasi dan laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah kurang valid dan kurang bisa diandalkan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu rawan menimbulkan terjadinya penyimpangan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh aparatur di lingkungan pemerintah daerah, serta tidak mendukung pelaksanaan *Treasury Single Account* (TSA) dan Akuntansi berbasis akrual. Saat ini yang terjadi BPS baru bisa mengukur realisasi target yang dilaporkan oleh para Menteri dan Pemerintah Daerah (PEMDA) di Indonesia setelah terjadi. Para Menteri dan PEMDA tersebut tidak bisa sama sekali melakukan *adjustment* (penyesuaian) di tengah jalan karena ketiadaan sistem yang melakukan evaluasi di tengah jalan, ataupun kalau bisa sangatlah terlambat (dengan usaha luar biasa keras). Setelah skor terakhir direlease BPS dan umumnya targetnya tidak tercapai, maka para Menteri dan PEMDA kemudian sibuk melakukan argumentasi untuk pembelaan diri. Hal ini sebenarnya tidak



akan terjadi seandainya mengintegrasikan teknologi informasi (IT) dan telekomunikasi dalam satu sistem.

#### **b. Kurangnya Aplikasi Teknologi Informasi (IT)**

Persoalan besar seperti opini *disclaimer* laporan keuangan PEMDA, kasus korupsi berjamaah dan konflik tanah di beberapa daerah seperti Mesuji Lampung, kasus agraria di Kalimantan dan Sulawesi, menunjukkan betapa lemahnya aplikasi sistem IT dan telekomunikasi diantara lembaga negara dan daerah saat ini. Data tanah sengketa yang masih dalam database lembaga peradilan, tidak bisa diakses Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga sertifikat hak milik tetap diterbitkan. Ironisnya data sertifikat BPN yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap tidak bisa mencegah Mahkamah agung (MA) mengambil putusan eksekusi penyitaan.

Kasus lain yang berhubungan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi, juga tidak lepas dari masih manualnya sistem administrasi negara. Ternyata tidak kurang dari 1.366 peraturan daerah (PERDA) ekonomi yang berkaitan dengan pajak dan retribusi tidak dilaporkan kepada pemerintah pusat. Ribuan transaksi antara PEMDA dengan pihak luar yang berhubungan dengan keuangan daerah terpaksa harus diselesaikan selama bertahun-tahun karena harus "memelototi" lembaran manual transaksi sehingga banyak calon investor yang kabur. Hal itu terjadi karena saat ini masih terbatasnya peranan dan dukungan IT dan telekomunikasi. Dengan terbatas dan sedikitnya aplikasi teknologi informasi (IT) baik perangkat keras maupun perangkat lunak (sistem informasi database, internet dan lain-lain) dan telekomunikasi dalam mengolah data untuk menghasilkan sistem informasi secara cepat, detail, dan akurat. Sudah barang tentu PEMDA tidak dapat berharap memiliki SIM (Sistem Informasi Manajemen), DSS, dan sistem pakar yang baik.

#### **c. Kurang efektifnya peranan manajemen informasi**

Manajemen informasi merupakan hal yang sangat krusial dalam menghasilkan informasi, khususnya sistem keuangan daerah. Selain teknologi informasi yang digunakan karena dengan manajemen informasi yang efektif dan handal dapat menghasilkan perangkat manusia (*brainware*) yang dapat mengimplementasikan sistem informasi yang dibangun khususnya sistem informasi akuntansi (SIA), sistem keuangan daerah dan mengembangkan teknologi informasi sejalan dengan perkembangan akuntansi dan keuangan daerah di masa mendatang. Oleh karena itu, PEMDA membutuhkan orang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, keuangan dan IT (lulusan teknik informatika, ilmu komputer, sistem informasi dan lain-lain) untuk menempati posisi manajemen informasi di lingkungan PEMDA. Harapannya dengan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya mereka dapat menggunakan dan mengembangkan teknologi informasi (IT) yang banyak digunakan dalam dunia bisnis disesuaikan dengan perkembangan sistem keuangan termutakhir yang dibutuhkan PEMDA.

## **2. Memformulasikan Pembentukan Dewan Audit Forensik Daerah Berbasis Teknologi Informasi (IT)**

Formula Pembentukan Dewan Audit Forensik Daerah Berbasis IT ini diilhami oleh sebuah ide kreatif dan cerdas dari sebuah perusahaan konsultan internasional yang merekomendasikan pendirian sebuah Information Technology Audit Council (ITAC) dalam sebuah perusahaan. Kemudian, penulis mencoba menerapkannya dalam lingkungan Pemda dengan beberapa perubahan



nama bagian dan tugasnya masing-masing. Kemajuan era teknologi informasi saat ini yang menembus batas-batas tempat dan ruang waktu membuat Pemda mau tak mau harus melakukan perubahan dalam teknologi informasi yang dimilikinya saat ini. Beberapa hasil studi dan riset menunjukkan hampir 70 persen penguasaan IT di lingkungan Pemda di Indonesia masih sangat lemah sekali berimbang rendahnya keefektifan dan keefisienan dalam proses operasi dan pelayanannya terhadap publik. Dalam formula Dewan Audit Forensik Daerah berbasis IT ini, Penulis mengajukan rancangan formulanya, sebagai berikut: Seorang CIO (Chief Information Officer) akan dijabat Bupati atau Walikota yang langsung bertanggung jawab kepada CEO (Chief Executive Officer) dalam hal ini seorang Gubernur. CIO sendiri secara fungsional membawahi tiga divisi: yakni sistem informasi, teknologi informasi, dan manajemen informasi. Divisi sistem informasi berfungsi menganalisis kebutuhan informasi dari sebuah Pemda baik saat ini maupun di kemudian hari (aspek demand dan informasi). Secara prinsip, ada dua jenis aktivitas yang harus dilakukan oleh divisi ini, yaitu:

1. *Government Support*, merupakan fungsi untuk selalu memonitor kebutuhan manajemen Pemda akan informasi sebagai penunjang dalam menjalankan aktivitas pemerintah dan bisnis sehari-hari, mengevaluasi tingkat efektivitas penggunaan aplikasi-aplikasi tambahan perbaikan terhadap sistem yang dimiliki dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan baru.
2. *Information Sistem Studies*, merupakan suatu forum penelitian dan pengembangan yang bertanggung jawab untuk selalu memantau perkembangan teknologi di suatu instansi tempat beroperasinya pemerintah daerah tersebut, terutama bagi kompetitor yang memanfaatkannya. Secara berkala, forum ini akan mempresentasikan kepada manajemen puncak kesempatan-kesempatan bisnis pemerintah yang mungkin dilakukan di kemudian hari melalui perangkat teknologi informasi yang baru.

Bagian kedua adalah Divisi Teknologi Informasi yang merupakan fungsi organisasi yang bertanggung jawab menyediakan kebutuhan informasi dari manajemen (*aspek supply*) dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Paling tidak setidaknya harus ada tiga ahli di bidang ini:

- a. Spesialisasi pada pengembangan infrastruktur teknologi informasi berintegrasi pada kerja sistem (LAN, WAN, Intranet, Internet, dan lainnya).
- b. Spesialisasi pada pengembangan perangkat lunak, termasuk di dalamnya pembuatan aplikasi, perencanaan sistem basis data, aplikasi analisis, dan sebagainya.
- c. Spesialisasi pada implementasi paket-paket yang sudah jadi, seperti oracle, SAP, BAAN, dan sebagainya.

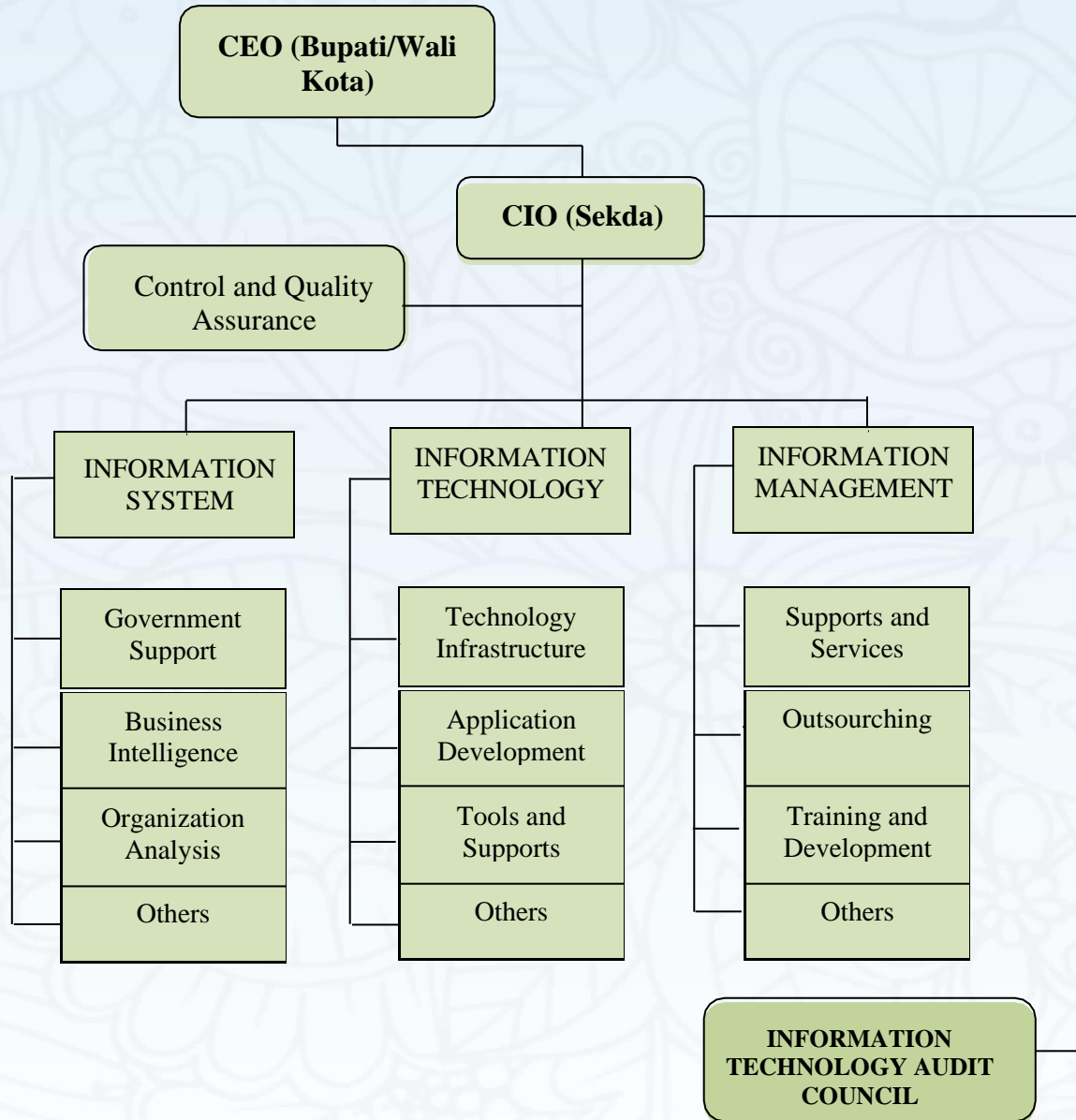
Bagian ketiga yang bertanggung jawab kepada CIO adalah Divisi Manajemen Informasi yang memiliki tugas utama untuk mengelola dan menjamin agar informasi yang dibutuhkan users dapat dihasilkan oleh suppliers teknologi informasi.

Berdasarkan tugas utama tersebut, paling tidak harus terdapat tiga bagian dalam divisi tersebut:

- a. Pengelola hubungan Pemda dengan para penyedia sehubungan dengan teknologi informasi yang diperlukan.
- b. Support and services, yakni mengatasi permasalahan manajemen maupun masalah teknis

- dalam aktivitas pemerintah daerah.
- c. Pelatihan dan pengembangan untuk selalu meningkatkan kinerja SDM dengan memperbaiki tingkat kompetensi mereka.
- Agar seluruh aktivitas yang dilakukan memiliki kualitas yang baik, CIO akan dibantu oleh tim atau seorang *Quality Control Assurance*

**Gambar 1**  
**Formula Pembentukan Dewan Audit Forensik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah**







Sumber: Renaissance Advisors, 1997 (dengan beberapa perubahan)

## KESIMPULAN

Paparan dalam paper ini menunjukkan adanya relasi kuat antara adanya Dewan Audit Forensik Daerah Berbasis Teknologi Informasi (IT) dalam mengembangkan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal (SPI) di lingkungan pemerintah daerah demi mewujudkan good governance melalui penciptaan sistem keuangan daerah yang handal. Selain itu, pemerintah daerah (Pemda) dituntut lebih aktif dan kreatif dalam memaksimalkan setiap kesempatan dan potensi yang dimilikinya. Tak kalah penting, perbaikan dan pembenahan dalam berbagai aspek harus dilakukan Pemda. Beberapa perbaikan dan pembenahan aspek yang dapat dilakukan Pemda, antara lain: **Pertama**, Perbaikan infrastruktur kelembagaan. Aspek infrastruktur kelembagaan merupakan aspek utama yang harus diperbaiki oleh pemerintah dalam sistem birokrasi Indonesia. Caranya dengan reformasi sistem administrasi, reformasi sistem hukum/legal, reformasi sistem politik dan peningkatan kualitas aparatur negara. Dalam hal ini aspek kelembagaan hukum berupa penegakan hukum memainkan peran penting. Penegakan hukum penting dilaksanakan untuk memberikan jamanan investasi dan hukum kepada investor. Diharapkan dengan penegakan hukum yang tegas akan tercipta iklim usaha kondusif. Harapannya bisa memangkas biaya siluman yang dipungut para calo/mafia dalam melakukan aktivitas bisnis di Indonesia.

**Kedua**, Perubahan paradigma/kultur birokrasi ke arah Entrepreneurial. Kecenderungan perilaku dan pelayanan birokrasi Indonesia saat ini masih sangat kental dengan model hirarkis kuno, konsekuensinya kreativitas dan inovasi dalam pelayanan publik cenderung tertutup. Tentu saja model ini tidak efisien dan praktis lagi karena memicu terjadinya kebijakan berbiaya ekonomi tinggi. Oleh karena itu perubahan paradigma menuju arah entrepreneurial bisa menjadi solusinya, alasannya sistem entrepreneur memberikan kesempatan terjadinya inisiatif-inisiatif baru dalam tubuh pemerintahan yang bisa merubah pola pikir para aparatur negara untuk mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

**Ketiga**, Penggunaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang terintegrasi berbasis teknologi informasi (IT). Beberapa Keuntungan penggunaan PTSP satu pintu berbasis IT, antara lain: Pertama, mengurangi kontak langsung petugas dengan investor. Kedua, terjadi pemisahan yang jelas antara unit penerimaan/verifikasi dokumen (*front office*) dengan unit penyiapan surat persetujuan/izin (*back office*) dan Ketiga, memotong rantai birokrasi dengan mempercepat proses perizinan. Selain itu kekuatan informasi dan teknologi (IT) tidak bisa diremehkan karena beberapa negara yang telah mengaplikasikan kemajuan teknologi ini, ternyata mampu menjadi negara yang kuat dalam bidang apapun. Mengingat betapa besar dan pentingnya manfaat dari teknologi IT dalam menciptakan *E-Government*, maka perbaikan infrastruktur kelembagaan administrasi daerah dengan memanfaatkan kekuatan teknologi IT bisa menjadi salah satu solusi utama dalam memperbaiki lemahnya sistem administrasi daerah dan Sistem informasi Keuangan Daerah yang masih cenderung tertutup, kurang transparan dan akuntabel yang menjadi penyebab utama penghambat terwujudnya *good governance* di lingkungan Pemda.



## Saran

Solusi Pembentukan Dewan Audit Forensik Daerah serta reformasi sistem birokrasi dan kelembagaan saja tidak cukup dalam memberantas korupsi di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) karena lingkaran korupsi sudah mengakar dari pejabat atas ke bawahannya. Tidak mudah untuk mengatasi hal ini, namun transformasi perlu dilakukan dari hal yang paling mendasar. Beberapa langkah yang harus segera dilakukan, antara lain: **Pertama**, Menguatkan peran pemerintah pusat dengan merevisi UU tentang otonomi daerah (Otda). Peran gubernur perlu diperkuat agar dapat memecat pejabat daerah tingkat II yang bermasalah.

**Kedua**, meningkatkan peran dan fungsi pengawasan KPK di daerah. Realisasinya bisa seperti kampanye antikorupsi agresif, penerbitan indikator kepuasan publik, pelatihan pegawai negeri sipil, audit secara berkala, dan perlindungan terhadap whistle blower. Dalam hal ini, KPK harus memberikan jaminan bahwa pihak swasta tidak akan terkriminalisasi. Ada kekhawatiran segala bentuk transfer uang kepada pejabat diartikan sebagai penyuapan padahal realitasnya tidak selalu demikian.

**Ketiga**, mengevaluasi hasil pemekaran daerah. Sistem otonomi daerah saat ini memicu celah untuk melakukan tindakan korupsi sehingga pemekaran lebih baik dihentikan sampai terdapat perangkat hukum yang tepat untuk memperkuat pengawasan pusat di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, Purnomo, Damayanti. May 2007. *Memerangi Korupsi Yang Terdesentralisasi Di Indonesia*. Bank Dunia
- Hall, A. James. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi edisi keempat*. Salemba Empat: Jakarta
- Hall, A. James. 2009. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbitan Universitas Muhamaddiyah Malang: Malang.
- Harahap, Sofyan S. 2002. *Teori Akuntansi*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hariningsih,
- SP. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*. Penerbit Ardana Media: Yogyakarta. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Di Indonesia. 2006. Transparency International Indonesia.
- Indrajit, Richardus Eko (2000), "*Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*", Penerbit: PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Krismiaji. 2002. *Sistem Informasi Akuntansi*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Krismiaji. 2005. *Sistem Informasi Akuntansi*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Laudon, Kenneth C. 2008. *Sistem Informasi Manajemen* (edisi kesepuluh). Salemba Empat: Jakarta.
- Mardi. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Ghalia Indonesia: Bogor.



- Mardiasmo (2002), *“Akuntansi Sektor Publik”*, Penerbit : Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo ( 2002), *“Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”*, Penerbit : Andi, Yogyakarta.
- Marom, Choirul. 2002. *Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang*. Grasindo: Jakarta.
- Media Indonesia, 6 Februari 2012.
- Moleong, Lexy (2000), *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Penerbit: PT. Rineka Cipta, Bandung.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Mulyadi. 2005. *Sistem Informasi Akuntansi*. STIE YKPN: Yogyakarta.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Muhammad, Fadel. Tanpa Tahun. *Reinventing Local Government Untuk Memberdayakan Birokrasi Pemerintah Daerah*, (Online), ([www.fadelmuhammad.org](http://www.fadelmuhammad.org)), diakses tanggal 27 September 2019).
- Muhammad, Fadel. Tanpa Tahun. *Pembangunan Daerah Fokus Pada Keunggulan Daerah*, (Online), ([www.fadelmuhammad.org](http://www.fadelmuhammad.org)), diakses tanggal 27 September 2019).
- Murdiansyah, Isnan dan Rahmanti, Virginia Nur. 2007. *Pembentukan Dewan Perwakilan Users berbasis Teknologi Informasi (IT) demi mewujudkan Sistem Keuangan Daerah yang handal*. Karya Tulis Ilmiah Tidak dipublikasikan. Universitas Brawijaya.
- Murdiansyah, Isnan. 2012. *Memberantas Biaya Siluman*. Kolom opini Harian nasional Suara Karya, 19 April 2012.
- United Nations (1987). *Report of the World Commission on Environment and Development*. General Assembly Resolution 42/187, 11 December 1987. Retrieved from <http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm>. 28 July 2010.